

Demokrasi Sebagai Kontrol Publik

Dr. Otto Gusti, SVD
(Dosen Filsafat di STFK Ledalero)
Pos Kupang, Sabtu 28 November 2015

Maumere pada bulan Mei 2015. Pada suatu malam sekitar pkl. 19.30 bersama seorang sahabat saya melintasi jalan utama kota menuju Kewapante. Di ujung timur, mobil kami terpaksa harus antre selama 40 menit bersama ratusan kendaraan lainnya yang tidak dapat menembus kerumunan massa. Massa berkumpul dan memblokir jalan utama lintas Flores dengan dalih “berdoa rosario“. Akbarisasi ritus keagamaan yang mengkooptasi ruang publik seperti ini merupakan pemandangan lazim selama bulan Maria (Mei dan Oktober) di beberapa wilayah di Pulau Flores.

Ruang Publik

Peristiwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh di mana ruang publik dikooptasi oleh kelompok-kelompok privat. Lebih parah lagi, pencaplokan terhadap ruang publik tersebut sering dianggap “normal” sebab dilakukan oleh kelompok mayoritas. Seolah-olah terdapat sebuah *common sense* bahwa mayoritas adalah kebenaran.

Ruang publik adalah jantung demokrasi. Karena itu ia seharusnya menampilkan wajah plural. Sebagai ruang plural ruang publik adalah rumah bersama lintas ideologi, kepentingan dan agama serta dihuni oleh kebajikan-kebajikan seperti toleransi, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas sebagai prasyarat sebuah demokrasi yang berkualitas. Berdoa adalah hak asasi warga yang harus dilindungi dan diberi ruang. Tapi eksperesinya tak pernah dibenarkan dengan membatasi hak warga lain yang telah membayar pajak untuk menggunakan jalan umum. Dalam sebuah demokrasi dibutuhkan kebajikan untuk membedakan mana pekarangan rumah yang boleh diblokir kapan saja dan mana jalan umum.

Bangunan institusi demokrasi tanpa ruang publik etis, akan membuat demokrasi mudah tersandera dalam himpitan penjarahan para oligark dan kooptasi para bandit yang mengatasnamakan Tuhan. Ingat, term Yunani *demos* dalam demokrasi tidak saja berarti *people* (rakyat yang beradab), tapi juga *mob* yang artinya massa beringas. Maka, demokrasi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah etika publik akan berubah menjadi pemerintahan oleh para bandit. Satu alasan mengapa Platon pada masanya secara kategoris menolak demokrasi.

Tentang demokrasi Benjamin Franklin pernah menulis: “Demokrasi adalah dua serigala dan satu domba yang sedang melakukan pemungutan suara mau makan apa“ (Bdk. AE Priyono dan Usman Hamid, 2014). Makna di balik anekdot ini ialah bahwa akhirnya dua serigala menjatuhkan pilihan untuk memangsa domba. Persis inilah yang terjadi dalam demokrasi prosedural tanpa kontrol dan partisipasi publik sehingga proses penyelenggaraan negara berada di bawah kendali *invisible hands* yakni para oligark dan kaum fundamentalis agama yang merebut ruang kebebasan asasi warga negara dengan memaksakan ideologinya sebagai ideologi negara.

Patronase dan Populisme

Di samping oligarki, demokrasi elektoral juga memberikan legitimasi bagi monopoli elit dalam bentuk praktik patronase, kartel dan politik dinasti. Dalam demokrasi elektoral patronase berarti „pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik“ (Bdk. Edward Aspinall, Mada Sukmajati, 2014). Dalam penelitian tentang demokrasi di India pasca-kemerdekaan Kanchan Chandra mengartikan demokrasi patronase sebagai „demokrasi di mana negara memiliki monopoli relatif atas pekerjaan dan jasa, dan di mana para pejabat terpilih memiliki diskresi (ruang gerak) signifikan dalam pelaksanaan hukum untuk mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan dan jasa-jasa itu sebagai pemberian negara“ (Bdk. AE Priyono, *op.cit.*).

Praktik politik patronase dapat terwujud dalam bentuk donasi uang tunai, barang, jasa, pemberian kontrak proyek oleh para politisi. Sasaran pemberian dalam praktik politik patronase adalah individu berupa amplop berisi uang misalnya atau kelompok seperti pembangunan gedung gereja untuk sebuah paroki. Uang yang diberikan bisa berasal dari kocek pribadi sang politisi atau berasal dari dana publik seperti dana bansos yang didistribusikan menjelang pemilihan bupati atau gubernur.

Survey yang diselenggarakan oleh lembaga PWD (Power, Welfare and Democracy) dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2013 menunjukkan, untuk keluar dari cengkeraman oligarki, populisme merupakan solusi yang muncul di arena politik Indonesia. Baik aktor dominan (47%) maupun aktor alternatif (31%) pada umumnya menggunakan populisme untuk memobilisasi dan mengorganisasi dukungan. Politik populis adalah reaksi atas munculnya ketidakpercayaan mayoritas masyarakat terhadap institusi sosial dan politik dalam sebuah negara yang dikendali para oligark.

Lubang yang ditinggalkan oleh institusi formal ini kemudian diisi oleh para politisi dengan menggunakan populisme. Namun para politisi populis cenderung menggunakan „populisme sebagai jalan pintas“ dan gagal membangun sistem dan birokrasi yang “populis“ pula. Tanpa pembangunan sistem, populisme tak lebih dari strategi para politisi untuk meraih dukungan dengan menunjukkan keberpihakan pada isu-isu publik seperti isu kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Namun di sisi lain keberpihakan itu sering menjadi legitimasi ketika para aktor politik melabrak aturan main yang sesungguhnya melemahkan demokrasi.

Kontrop Publik

David Beetham mengartikan demokrasi sebagai kontrol populer terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warganegara. Ketika “urusan kesejahteraan“ ditempatkan dalam kerangka kontrol publik dan kesetaraan warga, maka urusan kesejahteraan bukan lagi sekedar perkara managerial atau pasar, tapi urusan politik yang membutuhkan keterlibatan warga secara luas. Demokrasi adalah pilihan terbaik untuk meraih kesejahteraan. Kesejahteraan di sini tidak dapat direduksi kepada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, tapi juga mencakupi aspek kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, kesetaraan, rasa aman dan lain-lain. Aspek-aspek ini hanya mungkin terpenuhi jika proses pengambilan keputusan publik mengandaikan partisipasi warga dan kontrol publik yang luas. Dan inilah esensi demokrasi.

